

Pengaruh Porsi Kepemilikan Publik, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Kap, *Financial Distress*, Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Sukarela

The Influence of Public Ownership Portion, Proportion of Independent Commissioners, Capital Market Size, Financial Distress, and Board of Directors Size on Voluntary Disclosure

Maulida Putri Rahmasari^{a*}, Fatchan Achyani^b

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{a,b}

^ab200210424@student.ums.ac.id *,^bfa185@ums.ac.id

Disubmit : 10 Juni 2025, Diterima : 1 Juli 2025, Dipublikasi : 15 Juli 2025

Abstract

This study aims to analyze the effect of public ownership portion, proportion of independent board of commissioners, size of Public Accounting Firm (KAP), financial distress, and size of board of directors on voluntary disclosure in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021–2023. Voluntary disclosure is a form of corporate transparency that can increase investor and stakeholder trust. The method used in this study is a quantitative method with a descriptive approach. The data used are secondary data obtained through the company's annual report. The research sample was selected using a purposive sampling technique, with a final number of 119 manufacturing companies. Data analysis was carried out using multiple linear regression through the SPSS program. The results showed that the proportion of independent board of commissioners, KAP size, financial distress, and the size of the board of directors did not have a significant effect on voluntary disclosure. Meanwhile, the portion of public ownership had a significant positive effect on voluntary disclosure. These findings indicate that corporate governance factors and the company's internal financial condition also influence the level of voluntary disclosure of information to the public.

Keywords: *voluntary disclosure, public ownership, independent commissioners, KAP size, financial distress, board of directors.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh porsi kepemilikan publik, proporsi dewan komisaris independen, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), *financial distress*, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Pengungkapan sukarela merupakan salah satu bentuk transparansi perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan (annual report) perusahaan. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah akhir sebanyak 119 perusahaan manufaktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, ukuran KAP, *financial distress*, dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sementara itu, porsi kepemilikan publik berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor tata kelola perusahaan dan kondisi keuangan internal perusahaan turut memengaruhi tingkat pengungkapan informasi secara sukarela kepada publik.

Kata Kunci: pengungkapan sukarela, kepemilikan publik, komisaris independen, ukuran KAP, financial distress, dewan direksi.

1. Pendahuluan

Hasil utama yang dihasilkan dari sistem akuntansi keuangan perusahaan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak – pihak yang berkepentingan adalah sebuah laporan, yang dilakukan melalui laporan keuangan maupun laporan tahunan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perubahan tersebut (Munthe et al., 2022).

Pada dasarnya penyusunan laporan keuangan terdiri atas laporan neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*income statement*), serta laporan perubahan modal (*retained earnings*). Pada prakteknya sering diikutsertakan laporan keuangan lain yang memiliki sifat membantu untuk memperoleh penjelasan lanjut maupun kepentingan analisa, seperti laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas, laporan perubahan laba kotor serta laporan biaya produksi (Munthe et al., 2022).

Pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi bagian penting bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam memahami kondisi riil perusahaan (Syafaat dan Putra, 2020). Tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, yang berarti bahwa semakin besar tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan maka semakin lengkap pula laporan keuangan sebuah perusahaan.

Pengungkapan (*disclosure*) terdiri atas dua jenis yang terdapat didalam laporan keuangan dan berkaitan juga dengan persetujuan yang sudah disahkan oleh standar akuntansi yang berlaku Wahyuningsih, Arifati, dan Raharjo (2016) dalam Martha dan Prisilia (2021). Pengungkapan wajib adalah informasi wajib yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 dan pengungkapan sukarela merupakan setiap informasi tambahan yang diungkapkan diluar pengungkapan wajib yang tidak diatur dan disediakan secara sukarela oleh manajemen (Ridwan & Afriyenti, 2019).

Informasi yang dilaporkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela (Azaria & Achyani, 2014). Pengungkapan (*disclosure*) terdiri atas dua jenis yang terdapat didalam laporan keuangan dan berkaitan juga dengan persetujuan yang sudah disahkan oleh standar akuntansi yang berlaku Wahyuningsih, Arifati, dan Raharjo (2016) dalam Martha dan Prisilia (2021). Pengungkapan wajib adalah informasi wajib yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 dan pengungkapan sukarela merupakan setiap informasi tambahan yang diungkapkan diluar pengungkapan wajib yang tidak diatur dan disediakan secara sukarela oleh manajemen (Ridwan & Afriyenti, 2019).

Pentingnya pelaporan keuangan dilakukan dengan pengungkapan sukarela oleh manajemen agar asimetri informasi terhindar dari yang dapat memicu terjadinya konflik keagenan antara manajemen dan juga pemegang saham, asimetri informasi antara pihak principal dan agen timbul karena terjadi praktik pada pengungkapan sukarela yang mempunyai kontribusi dalam menurunkan biaya agensi Faten (2003) dalam Pratiwi dan Afriyenti (2023).

Tidak ada standar baku yang mengatur mengenai pengungkapan sukarela, sehingga tiap perusahaan menganut kebijakan yang berbeda – beda dalam melakukan pengungkapan laporan sukarela. Menurut Suripto (1999) dalam Suta (2012),

manajemen memiliki beberapa pertimbangan untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, salah satunya adalah faktor biaya dan manfaat. Menurut Suryani (2007) dalam Suta (2012) manajer masih dihadapkan dengan *trade off* antara penyediaan laporan keuangan yang dapat membantu pengguna dalam menentukan nilai perusahaan secara tepat dengan pembatasan penyediaan informasi yang dapat memaksimalkan keuntungan pasar produk perusahaan.

Untuk pengungkapan wajib, seluruh perusahaan telah melakukannya tetapi dalam hal pengungkapan sukarela belum semua perusahaan melakukannya. Berdasarkan data yang ada terdapat 8 perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar LQ45 di BEI selama 5 tahun. Salah satu perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela adalah PT. Indocement Tungal Perkasa dengan rata - rata Indeks Pengungkapan Sukarela sebesar 0.73 dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan 7 perusahaan lainnya yang melakukan pengungkapan sukarela adalah PT Semen Indonesia (Persero) dengan rata - rata Indeks Pengungkapan Sukarela sebesar 0.68, PT Astra Internasional dengan rata - rata Indeks Pengungkapan Sukarela sebesar 0.63, PT Sri Rejeki Isman dengan rata - rata Indeks Pengungkapan Sukarela sebesar 0.64, PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan rata - rata Indeks Pengungkapan Sukarela sebesar 0.69, PT Indofood Sukses Makmur dengan rata - rata Indeks Pengungkapan Sukarela sebesar 0.61, PT Gudang Garam dengan rata - rata Indeks Pengungkapan Sukarela sebesar 0.51, dan PT Unilever Indonesia dengan rata - rata Indeks Pengungkapan Sukarela sebesar 0.65. Menurut Elfeky (2017) dalam Yustira (2021) indeks pengungkapan sukarela dibagi menjadi 69 item dengan 13 kategori. Semakin banyak item yang diungkapkan dalam laporan tahunan maka semakin besar indeks pengungkapan yang dipenuhi. Perusahaan dengan indeks pengungkapan yang tinggi menunjukkan bahwa praktik pengungkapan telah dilakukan dengan memadai Dibiyanoro (2011) dalam Yustira (2021). Namun dalam kenyataannya perusahaan tidak melakukan pengungkapan sukarela yang lengkap dan jelas, berdasarkan data yang tertulis dapat dilihat rata-rata pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan itu sekitar 0.64 atau sekitar 64% saja (Syarifudin et al., 2021).

Pertimbangan manajemen untuk pengungkapan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari biayanya (Hardiningsih, 2008).

Pengungkapan sukarela informasi laporan tahunan sangat diperlukan oleh pihak-pihak pengguna, khususnya stakeholder, untuk menilai kinerja perusahaan, untuk menilai return saham yang akan diperoleh, dan untuk menganalisis kelangsungan usaha perusahaan (Wardani, 2013). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan pengungkapan sukarela diantaranya yaitu porsi kepemilikan publik, proporsi dewan komisaris, ukuran KAP, *financial distress*, dan dewan direksi.

Yang pertama porsi kepemilikan publik, Menurut Ainun dan Fuad (2000) dalam Agustin dan Oktavianna (2019), adanya perbedaan jumlah saham yang dimiliki oleh investor dari luar perusahaan akan mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Kepemilikan publik yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan, karena perusahaan yang memiliki porsi saham publik yang tinggi akan menjadi sorotan publik, sehingga akan

banyak tekanan dari pemegang saham dan analis, untuk meminimalkan tekanan dari publik tersebut maka manajemen perusahaan akan melakukan pengungkapan butiran-butiran informasi lebih luas (Martha dan Prisilia, 2021). Penelitian mengenai pengaruh porsi kepemilikan publik terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Margamiharja dan Triyanto (2021), hasilnya diperoleh bahwa porsi kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, sementara penelitian oleh Agusti dan Oktavianna (2019), hasilnya diperoleh bahwa porsi kepemilikan publik berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Faktor kedua adalah proporsi dewan komisaris, dewan komisaris menduduki posisi tertinggi terhadap informasi yang berhubungan dengan manajemen perusahaan. Dewan komisaris bertanggungjawab untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kinerjanya akan dinilai berdasarkan proporsi jumlahnya. Menurut Akhtaruddin, et al., (2009) dalam Wijayanti (2013) mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang tinggi berhubungan dengan transparansi perusahaan dalam bentuk luasnya pengungkapan informasi. Pengujian pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Wijayanti (2013), hasilnya diperoleh bahwa penelitian proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sementara penelitian oleh Poluan dan Nugroho (2015), hasilnya diperoleh bahwa penelitian proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Faktor ketiga adalah ukuran kantor akuntan publik, kantor akuntan publik besar diasumsikan memiliki konsistensi, kualitas dan profesionalitas yang cukup, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Sedangkan kantor akuntan publik kecil belum cukup memiliki konsistensi, kualitas dan profesionalitas yang sebanding dengan kantor akuntan publik besar, sehingga cenderung akan berusaha mengikuti kebutuhan kliennya. Reputasi kantor akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaan, berhubungan dengan pengungkapan sukarela karena dalam laporan keuangan mencerminkan transparansi bagi pemeriksa laporan keuangan tersebut (Agustin dan Oktavianna, 2019). Penelitian mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Fitriana (2014), hasilnya diperoleh bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela, sementara penelitian oleh Tumewu et al., (2021), hasilnya diperoleh bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengungkapan sukarela adalah *financial distress*, Gantjowati dan Nugraheni (2014) dalam Pratiwi dan Afriyenti (2023) menyatakan bahwa suatu perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih untuk menarik para investor apabila perusahaan tersebut mempunyai *good news*, tetapi apabila perusahaan sedang mengalami kondisi *financial distress*, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang terbatas. Kondisi *financial distress* pada perusahaan biasanya terjadi akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, yang menyebabkan tekanan keuangan yang signifikan. Penelitian tentang pengaruh *financial distress* terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Pratiwi dan Afriyenti (2023), hasilnya diperoleh bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sementara pengujian oleh Karunia

(2016) hasilnya diperoleh bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela,

Faktor kelima yang mempengaruhi pengungkapan sukarela adalah ukuran dewan direksi. Perusahaan dengan dewan direksi skala besar kemungkinan akan secara sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan mereka di setiap tahun dan situs website Elfeky (2017) dalam Ridwan dan Afriyenti, (2019). Perusahaan dengan skala dewan direksi yang besar akan lebih menyadari pentingnya menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan, dengan jumlah anggota yang lebih besar, dewan direksi cenderung memiliki beragam latar belakang, keahlian, dan pandangan. Hal ini dapat mendorong pembahasan lebih mendalam mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas, yang dapat meningkatkan pengungkapan informasi secara lebih luas. Pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Cheng dan Courtenay (2006) dalam Ridwan dan Afriyenti (2019), mereka berpendapat bahwa ukuran dewan direksi yang besar mungkin akan memiliki efek negatif terhadap kinerja dewan direksi. Jumlah dewan yang tinggi mengurangi kemampuan penyampaian informasi dalam pengungkapan laporan tahunan perusahaan Ramadhan, (2014) dalam Yeo & Suparman (2021). Penelitian tentang ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Ridwan dan Afriyenti (2019), hasilnya diperoleh bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sementara pengujian oleh Yeo dan Suparman (2021) hasilnya diperoleh bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan sukarela. Penelitian ini mengembangkan studi Agustin dan Oktavianna (2019) dengan menambahkan *financial distress*, dan ukuran dewan direksi sebagai variabel independen yang diujikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Agustin dan Oktavianna (2019), yaitu perbedaan dalam sampel penelitian yang digunakan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sementara penelitian Agustin dan Oktavianna menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek dalam penelitian ini karena industri manufaktur memiliki peran penting dalam perekonomian dan memberikan data operasional yang relatif lengkap.

2. Tinjauan Literatur

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika seseorang ataupun lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) melakukan layanan jasa, memberikan keputusan pengambilan wewenang kepada agen (Sutisna et al., 2024). Hubungan ini didasarkan pada kontrak kerja dimana *principal* mempercayakan tanggungjawab tertentu kepada agen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam teori ini (*agency theory*), menjelaskan problematika resiko bersama yang muncul akibat adanya kerjasama antara dua pihak (*principal* dan agen) (Lesmono dan Siregar, 2021). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen bisa disebabkan karena tindakan agen tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, mengakibatkan terjadinya biaya keagenan (Bakti dan Triyono, 2022). Oleh karena itu,

penting bagi principal dan agen untuk menjalin komunikasi yang efektif dan membangun mekanisme pengawasan yang kuat guna meminimalkan risiko konflik biaya keagenan.

Teori Legitimasi

Suchman (1995, 574) mendefinisikan legitimasi sebagai "persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, dan keyakinan yang dibangun secara sosial, dan definisi". Definisi ini mengacu pada keadaan di mana subjek legitimasi tertentu, seperti organisasi atau praktik organisasi, memperoleh persetujuan kolektif yang dibuat secara subjektif dalam proses konstruksi sosial, sehingga menghasilkan "penilaian sosial" Bitektine (2011) dalam Md Zaini et al., (2020). Dalam konteks organisasi, legitimasi memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup perusahaan, dan status legitimasi dipandang sebagai strategi dan/atau prasyarat untuk mendapatkan sumber daya dan untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk keberadaan organisasi (Md Zaini et al., 2020). Studi pengungkapan menunjukkan variasi dalam sifat dan tingkat pengungkapan sukarela di seluruh perusahaan, industri, dan negara. Beberapa perusahaan mengungkapkan banyak informasi, sementara yang lain tidak mengungkapkan banyak Al-Akra dan Hutchinson (2013) dalam Md Zaini et al., (2020).

Teori Sinyal

Teori *signalling* merupakan motivasi perusahaan dalam memberikan informasi kepada para penggunanya. Salah satu langkah dalam memberikan sinyal positif dari perusahaan untuk para penggunanya adalah menyajikan setiap informasi yang lebih terperinci dan lebih luas yang seharusnya terdapat dalam laporan keuangan Murni (2016) dalam Pratiwi dan Afriyenti (2023). Teori sinyal menurut Ghaisani et al., (2019) dalam (Martha dan Prisilia (2021) adalah mengenai bagaimana semestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, berbentuk informasi mengenai kinerja manajemen dalam mewujudkan keinginan pemilik. Manajemen akan membagikan informasi yang mampu menambah kredibilitas perusahaan serta keberhasilan perusahaan walaupun informasi tersebut termasuk dalam informasi yang diwajibkan (Martha dan Prisilia, 2021).

Pengungkapan Sukarela

Menurut Sitepu, (2015) dalam Margamiharja dan Triyanto (2021), pengungkapan informasi lainnya yang dianggap relevan bagi pemakai laporan keuangan sesuai dengan kebijakan manajemen disebut pengungkapan sukarela. Menurut Na'im dan Rakhman, (2000) dalam Suta, (2012), manfaat dari pengungkapan sukarela yang diperoleh perusahaan antara lain meningkatkan kredibilitas perusahaan, membantu investor memahami strategi bisnis manajemen, menarik perhatian analis meningkatkan akurasi pasar, menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar, dan menurunkan kejutan pasar. Dengan demikian, pengungkapan sukarela tidak hanya menjadi alat komunikasi strategis bagi perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai elemen penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Pengungkapan sukarela tidak memiliki tuntutan untuk wajib diungkapkan namun dengan adanya pengungkapan sukarela diharapkan akan dapat memenuhi ketersediaan informasi yang di butuhkan bagi para stakeholder (Wardani, 2011).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh porsi kepemilikan publik terhadap pengungkapan sukarela.

Porsi kepemilikan publik yang besar dapat menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang semakin luas. Hal tersebut dikarenakan adanya tekanan dari masyarakat terhadap perusahaan agar manajemen memberikan informasi lebih guna memberikan acuan untuk kepentingan perencanaan investasi yang dilakukan (Margamiharja dan Triyanto, 2021). Perusahaan dengan porsi kepemilikan saham publik yang tinggi akan memperhatikan upaya untuk menjaga dan meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat. Sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih untuk menarik perhatian publik, membangun kepercayaan investor, dan menciptakan citra yang positif di pasar. Simanjuntak dan Widiastuti (2004) dan Amalia dan Dessy (2005) dalam Wardani

(2012) membuktikan bahwa porsi kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan, namun hasil penelitian ini berbeda dengan Benardi et al., (2009) dalam Wardani (2012) yang menyatakan bahwa porsi kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan dengan alasan bahwa secara historis dan empiris perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mayoritas dikuasai oleh kalangan keluarga, sehingga manajer hanya menjadi kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas Benardi et al., (2009) dalam Wardani (2012). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Porsi kepemilikan publik berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela

Menurut Akhtaruddin et al., (2009) dalam Wijayanti (2013) jika nilai proporsi komisaris independen tinggi berkaitan dengan transparansi perusahaan dan bisa dinilai sejauh mana pengungkapan informasi yang telah dilakukan perusahaan. Dewan komisaris akan memantau kinerja perusahaan, jika nilai proporsi dewan komisaris independen tinggi maka pemantauan terhadap pengungkapan menjadi lebih akurat dan lebih luas. Hasil yang diperoleh oleh Wijayanti et al., (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas voluntary disclosure. Berbeda hasil dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rafifah dan Ratmono (2015) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap luas voluntary disclosure. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2: Proporsi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Ukuran KAP terhadap pengungkapan laporan sukarela

Reputasi kantor akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaan, berhubungan dengan pengungkapan sukarela karena dalam laporan keuangan mencerminkan transparansi bagi pemeriksa laporan keuangan tersebut (Agustin dan Oktaviana, 2019). Perusahaan yang menggunakan jasa KAP perlu memandang bahwa KAP sebagai pihak independen dan kompeten. Timbulnya kasus kecurangan atas audit yang tidak akurat dapat menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat pasar uang dan pasar modal (Auliyah et al., 2012). Ukuran KAP memengaruhi tingkat pengungkapan sukarela, dimana KAP *big four* mendorong pengungkapan yang lebih luas dan transparan karena reputasi, sumber daya, dan kepercayaan pasar yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3: Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Financial distress terhadap pengungkapan laporan sukarela.

Sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan biasanya terjadi kondisi yg disebut *financial distress*. Yang artinya informasi akan diungkapkan oleh perusahaan lebih sedikit apabila perusahaan mengalami kondisi *financial distress* Poluan dan Nugroho (2015) dalam Pratiwi dan Afriyenti (2023). Sebelum mengalami kebangkrutan, perusahaan sering mengalami kondisi *financial distress*, yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam situasi seperti ini cenderung mengungkapkan lebih sedikit informasi karena faktor risiko dan sumber daya yang terbatas. Namun, ada perusahaan yang meningkatkan pengungkapan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4: Financial Distress berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan laporan sukarela.

Anggota dewan direksi yang lebih banyak cenderung memiliki banyak perspektif, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda, yang memungkinkan

diskusi yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam hal pengungkapan informasi, keanekaragaman pengalaman dan keahlian anggota dewan dapat membantu meningkatkan pengawasan dewan secara keseluruhan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam melakukan pengungkapan informasi secara sukarela sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingan, seperti yang diungkapkan oleh Gandia (2008) dalam Ridwan dan Afriyenti (2019) ukuran dewan direksi yang besar memungkinkan beragam pengalaman dan pendapat yang berpotensi meningkatkan kapasitas pengawasan dewan, sehingga menyiratkan pengungkapan lebih sukarela. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H5: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan memperoleh hasil yang objektif dan dapat digeneralisasikan melalui analisis statistik terhadap data numerik. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan secara konsisten menerbitkan laporan tahunan selama periode 2021–2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, dan data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, yang mencerminkan transparansi informasi perusahaan. Sementara itu, variabel independen terdiri atas porsi kepemilikan publik, proporsi dewan komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik, kondisi kesulitan keuangan, dan ukuran dewan direksi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi, dan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Selain itu, pengujian juga mencakup evaluasi kelayakan model dan besarnya kemampuan prediksi model terhadap variasi yang terjadi pada variabel dependen.

4. Hasil Dan Pembahasan Data Sampel Perusahaan

Keseluruhan jumlah perusahaann manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 yaitu 165 perusahaan. Dari populasi tersebut diambil sampel kriteria dengan menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan 357 perusahaan manufaktur (119 perusahaan x 3) yang kemudian dilakukan penghapusan data outlier sebanyak 30 data sehingga data yang digunakan menjadi sampel analisis berjumlah 327. Proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode Pengamatan	165
2	Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Tidak Menyajikan Laporan Tahunan Selama Periode Pengamatan	(11)
3	Jumlah Perusahaan Manufaktur yang tidak bermata uang rupiah selama periode pengamatan	(30)
4	Jumlah perusahaan yang Tidak Menyediakan Informasi yang Dibutuhkan	(5)

Sampel Penelitian	119
Tahun Penelitian (3 tahun)	3
Jumlah Sampel Penelitian	357
Data Outlier	(30)
Sampel Akhir	327

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPS	327	0.67	0.83	0.7466	0.04168
PKP	327	0.29	69.86	22.7995	14.65556
PDKI	327	25	80	43.2141	10.62239
UKAP	327	0	1	0.28	0.449
FD	327	-199.26	117080.44	421.4813	6476.12315
UDD	327	2	12	4.62	2.304
Valid N	327				

Berdasarkan hasil uji statistik pada 327 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023, diketahui bahwa indeks pengungkapan sukarela memiliki nilai minimum 0,67 dan maksimum 0,83, dengan rata-rata 0,7466 dan standar deviasi 0,04168, menunjukkan tingkat pengungkapan yang relatif seragam di antara perusahaan. Porsi kepemilikan publik berkisar antara 0,29 hingga 69,86, dengan rata-rata 22,7995 dan standar deviasi 14,65556, mencerminkan dominasi kepemilikan internal serta variasi yang tinggi antar perusahaan. Porsi dewan komisaris independen memiliki nilai minimum 25 dan maksimum 80, dengan rata-rata 43,2141 dan standar deviasi 10,62239, menunjukkan upaya perusahaan dalam memenuhi ketentuan tata kelola meskipun belum merata. Ukuran KAP diklasifikasikan sebagai 1 untuk KAP Big Four dan 0 untuk non-Big Four, dengan rata-rata 0,28 dan standar deviasi 0,449, menandakan mayoritas perusahaan menggunakan jasa KAP non-Big Four. Financial distress memiliki rentang nilai yang sangat ekstrem, dari -199,26 hingga 117080,44, dengan rata-rata 421,4813 dan standar deviasi 6476,12315, menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kondisi keuangan antar perusahaan. Ukuran dewan direksi bervariasi dari 2 hingga 12, dengan rata-rata 4,62 dan standar deviasi 2,304, menunjukkan perbedaan yang cukup wajar dalam struktur manajemen perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji normalitas menggunakan metode Monte Carlo menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,067 ($> 0,05$), yang mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Spearman Rho juga menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pada uji autokorelasi, hasil Run Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,868 ($> 0,05$), yang menandakan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.754	0.011		66.990	0.000
PKP	0.000	0.000	-0.154	-2.780	0.006
PDKI	3.932E-05	0.000	0.010	0.181	0.856
UKAP	0.010	0.005	0.110	1.905	0.058
FD	5.775E-07	0.000	0.090	1.640	0.102
UDD	0.000	0.001	-0.026	-0.448	0.655

Dari hasil uji regresi linier berganda pada table 3, model persamaan regresi yang dapat dibuat, yaitu:

Indeks Pengungkapan Sukarela = 0,754 + 0,000 Porsi Kepemilikan Publik + 3,933 Proporsi Dewan Komisaris Independen + 0,010 Ukuran KAP + 5.776 *Financial Distress* + 0,000 Ukuran Dewan Direksi + e

Berdasarkan hasil persamaan regresi, dapat diinterpretasikan bahwa konstanta sebesar 0,754 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, potensi perusahaan dalam mengungkapkan informasi sukarela tetap ada. Koefisien regresi porsi kepemilikan publik dan ukuran dewan direksi yang bernilai 0,000 mengindikasikan bahwa perubahan pada kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Sebaliknya, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran KAP masing-masing memiliki koefisien sebesar 0,010 dengan arah positif, yang berarti peningkatan pada kedua variabel ini cenderung mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan sukarela. Selain itu, financial distress memiliki koefisien sebesar 5,776 dan juga menunjukkan hubungan positif, mengindikasikan bahwa semakin tinggi tekanan keuangan yang dialami perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan pengungkapan sukarela juga meningkat.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		F.hitung	Sig.	Keterangan
1	Regression	2.976	.012b	Signifikan

Berdasarkan hasil uji F seperti tampak pada Tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikansi masing-masing model sebesar $0.012 < \alpha (0.05)$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Signifikansi Parameter (Uji T)

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Parameter (Uji T)

Variabel	Sig.	Keterangan
PKP	0.006	H1 Diterima
PDKI	0.856	H2 Ditolak
UKAP	0.058	H2 Ditolak
FD	0.102	H2 Ditolak
UDD	0.655	H2 Ditolak

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 5, diketahui bahwa hanya variabel porsi kepemilikan publik yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi 0,006 (< 0,05), sehingga hipotesis H₁ diterima. Sementara itu, variabel porsi dewan komisaris independen (0,856), ukuran KAP (0,058), financial distress (0,102), dan jumlah dewan direksi (0,655) memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga hipotesis H₂, H₃, H₄, dan H₅ ditolak. Dengan demikian, secara parsial hanya porsi kepemilikan publik yang berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan keempat variabel lainnya tidak berpengaruh.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.210a	0.044	0.029

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6, variabel Porsi Kepemilikan Publik (X1), Porsi Dewan Komisaris Independen (X2), Ukuran KAP (X3), Financial Distres (X4), dan Dewan Direksi (X5) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Pengungkapan Sukarela (Y) sebesar 2,9%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 97,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam regresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih signifikan memengaruhi Pengungkapan Sukarela.

Pembahasan

Pengaruh Porsi Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel porsi kepemilikan publik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,006, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis (H1) diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara porsi kepemilikan publik terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin et al., (2021), Vernando dan Halmawati (2016), dan Ristyanto (2022) yang menyatakan bahwa porsi kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Semakin besar porsi kepemilikan publik dalam suatu perusahaan maka perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas, hal tersebut dikarenakan pemegang saham publik tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan dan sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh manajemen untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan. Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik menunjukkan besarnya *private information* yang harus dibagikan oleh manajer kepada publik (Agustin dan Oktavianna, 2019).

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel porsi dewan komisaris independen dengan nilai signifikansi sebesar 0.856, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian hipotesis (H2) ditolak, artinya bahwa variabel porsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Meskipun secara teori, keberadaan komisaris independen bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan mendorong transparansi, namun proporsi mereka tidak mempengaruhi tingkat keterbukaan informasi yang diungkapkan perusahaan secara sukarela. Hal tersebut dikarenakan peran mereka sangat terbatas dalam pengambilan keputusan pengungkapan, serta dalam pengungkapan sukarela

lebih diutamakan kualitas individu, seperti pengalaman dan keahlian, dan lebih menentukan dibandingkan jumlahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Oktavianna (2019) dan Wijayanti (2013) yang menyatakan porsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP dengan nilai signifikansi sebesar 0.058, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian hipotesis (H3) ditolak, artinya bahwa variabel ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Pengungkapan sukarela sepenuhnya merupakan keputusan strategis perusahaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit, karena auditor hanya berperan dalam menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, sehingga pengungkapan sukarela tidak terpengaruh oleh besar atau kecilnya jasa KAP yang digunakan. Perusahaan yang diaudit oleh pihak eksternal baik KAP Big Four maupun non Big Four tidak mempengaruhi seberapa luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa pengguna informasi keuangan tidak memperhatikan perbedaan hasil jasa yang diberikan oleh KAP Big Four maupun non Big Four (Tumewu et al., 2021).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumewu et al., (2021) dan Ristyanto (2022) yang menyatakan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel *financial distress* dengan nilai signifikansi sebesar 0.102, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian hipotesis (H4) ditolak, artinya bahwa variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* atau *nonfinancial distress* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, dikarenakan sedikit atau banyaknya pengungkapan sukarela tidak menjadi tolak ukur bagi pihak luar dari perusahaan untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut terlepas dari perusahaan tersebut berada dalam kondisi *financial distress* atau tidak (Saputri 2010) dalam Vernando dan Halmawati (2016). *Financial distress* tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela karena keputusan untuk mengungkap informasi secara sukarela didasarkan pada pertimbangan strategis, bukan dari kondisi keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karunia (2016) dan Vernando dan Halmawati (2016) yang menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi dengan nilai signifikansi sebesar 0.655, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian hipotesis (H5) ditolak, artinya bahwa variabel ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas memastikan pelaksanaan operasi dan kepengurusan perusahaan. Dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan diluar maupun didalam perusahaan (Ridwan dan Afriyenti, 2019). Dewan direksi bertanggungjawab penuh

atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Meskipun dewan direksi memegang peran penting dalam tata kelola perusahaan, namun kuantitas anggotanya terhadap tingkat pengungkapan sukarela dapat menjadi terbatas karena efektivitas pengawasan dan keputusan pengungkapan lebih ditentukan oleh kualitas anggota dewan bukan jumlah anggotanya, serta pengungkapan sukarela juga tidak menjadi fokus utama dalam tugas dan fungsi dari dewan direksi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeo dan Suparman (2021) yang menyatakan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh porsi kepemilikan publik, proporsi dewan komisaris independen, ukuran KAP, financial distress, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya porsi kepemilikan publik yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela, sementara variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti fokus hanya pada sektor manufaktur, periode observasi yang terbatas selama tiga tahun, penggunaan lima variabel independen yang belum mewakili seluruh faktor relevan, serta pengukuran pengungkapan sukarela yang masih berpotensi mengandung subjektivitas. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian mendatang mencakup perusahaan lintas sektor industri, memperluas rentang waktu penelitian, menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, dan good corporate governance, serta menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang telah terstandarisasi secara luas untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan generalis.

6. Daftar Pustaka

- Agusti, H. E., & Oktavianna, R. (2019). Pengaruh Porsi Kepemilikan Publik, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Ukuran Kap Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 093. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p093-103>
- Al., N. P. et. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bei. *Jurnal Neraca Agung*, 12(1), 64–74.
- Anam, H., & Liyanto, L. W. (2019). Proporsi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(1), 130–149. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i1.53>
- Auliyah, A. H. F., Fitriyani, D., & Herawaty, N. (2022). Analisis Pengaruh Ukuran KAP, Audit Tenure, Audit Fee dan Independensi Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 272. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2012>
- Azaria, A., & Achyani, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keluasan Pengungkapan Informasi Dalam Laporan Tahunan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Bakti, B. E. M., & Triyono. (2022). Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 104–111.
- Empiris, S., Perusahaan, P., & Suta, A. Y. (2012). Informasi Sukarela Laporan Tahunan. Fitriah, N., Wijaya, S. Y., & Masripah. (2022). Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akunida*, 8(1), 36–48. <https://doi.org/10.30997/jakd.v8i1.4719>
- Fitriana, D. E., & Bahri, S. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Entitas, dan Ukuran KAP Terhadap Audit Report Lag. *Owner*, 6(1), 964–976. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.704>
- Hardiningsih, O. P. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. 15(1), 67–79.
- Imtinan, G., & Hasibuan, D. H. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 215–224. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.488>
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Likuiditas, P. (2021). LEVERAGE TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN.
- Margamiharja, Y., & Triyanto, D. N. (2021). Voluntary Disclosure Pada Perusahaan BUMN di Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 9(1), 103–110. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v9i1.2982>
- Martha, L., & Prisilia, M. (2021). Pengaruh Solvabilitas, Porsi Saham Publik Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(4), 381–392. <https://doi.org/10.35145/procuratio.v9i4.1378>
- Md Zaini, S., Sharma, U., Samkin, G., & Davey, H. (2020). Impact of ownership structure on the level of voluntary disclosure: a study of listed family-controlled companies in Malaysia. *Accounting Forum*, 44(1), 1–34. <https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1605874>
- Muhammad Syafaat, & Aditya Putra. (2020). Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 157–177. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.30.156-176>
- Munthe, H., Benget, J. L., Simorangkir, E. R. (2022). Faktor Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. 4(1), 56-72.
- Pendidikan, J., & Jppt, T. (2022). Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah , Medan , Indonesia. 04(2), 273–289.
- Poluan, G., & Nugroho, P. I. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Kondisi Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 39–56.
- Pratiwi, A., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Financial Distress terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.472>
- Ridwan, R., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Ukuran Dewan Direksi, Dan Proporsi Direktur Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1376–1391.

- <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.149>
- Ristyanto, Y. A. (2022). (Studi Empiris pada Laporan Tahunan Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Tahun 2018-2020. 10(02), 88-106.
- Sembiring, Y. C. B., & Tambunan, H. Y. A. (2021). Pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan kepemilikan institusional perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 53(9), 1689-1699.
- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi pada Konteks Berbagai Issue di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802-4821. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973>
- Syarifudin, S., Wiharno, H., & Septiani, I. (2021). Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur Lq45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 221-236. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Tumewu, J., Murni, S. A., & Ika Aprilia, S. A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan Pada Perusahaan Pertambangan Non Migas. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 89-105. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3058>
- Vernando, R. Y., & Halmawati. (2016). Pengaruh Ownership Dispersion, Financial Distressed, dan Umur Listing Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014. *Jurnal WRA, Vol.4(No.1)*, 691-708.
- Wardani, R. P. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1). <https://doi.org/10.9744/jak.14.1.1-15>
- Yeo, J., & Suparman, M. (2021). Peranan Karakteristik Dewan Direksi dan Struktur Kepemilikan dalam Pengungkapan Sukarela Perusahaan Publik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 511-522. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.8960>